

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa memiliki tanggung jawab dalam memajukan pembangunan, baik dalam bentuk infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat menuju taraf kesejahteraan yang optimal. Dalam perannya sebagai representasi negara, desa menjadi wajah pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Tanggung jawab desa tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pemerintahan lokal, tetapi juga mencakup upaya nyata dalam memperhatikan kebutuhan dasar Masyarakat (Ahmad, & Malik, 2023). Desa juga menjadi tempat di mana kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dijalankan secara langsung, sehingga peran desa dalam menciptakan perubahan positif dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting.

Desa Mojorejo merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kota Batu, Jawa Timur, Indonesia. Desa Mojorejo memiliki luas wilayah 152,800 Ha, yang meliputi pemukiman penduduk, persawahan, perkantoran, sekolahan, jalan, lapangan dan makam. Desa Mojorejo terkenal dengan potensi ekonominya yang beragam, terutama dalam sektor pertanian, sayur organik, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan, UKM kerajinan kayu, produksi kerupuk kentang. Pada sektor pertanian, lahan pertanian yang dimiliki oleh Desa Mojorejo seluas 101.000 hektar yang mayoritas nya digunakan sebagai lahan persawahan dan sayur (Hanafi, 2022). Untuk sumber daya alam, Desa mojorejo memiliki sumber daya alam yang sangat memadai untuk mendukung kegiatan budidaya ikan. Terdapat perairan yang cukup baik berupa sungai dan sumber mata air yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya berbagai jenis ikan. Lahan yang tersedia juga memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan usaha budidaya ikan secara lebih optimal. Dengan potensi sumber daya yang ada, masyarakat desa memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil budidaya ikan.

Namun, meskipun potensi yang ada sangat besar, dalam kegiatan budidaya ikan di Desa Mojorejo masih menghadapi beberapa kendala. Yaitu salah satu kendala utama adalah penggunaan metode budidaya yang masih bersifat tradisional. Banyak masyarakat yang masih mengandalkan teknik-teknik lama yang kurang efisien, sehingga mengakibatkan rendahnya produktivitas, dengan metode tradisional ini sering kali tidak menggunakan teknologi modern yang dapat meningkatkan efisiensi dan hasil panen. Seperti yang disampaikan pada penelitian Junita (2024), tanpa penerapan teknik budidaya yang lebih baik, hasil yang diperoleh dari usaha budidaya ikan menjadi terbatas dan tidak akan maksimal.

Selain itu, skala usaha yang kecil juga menjadi masalah yang signifikan. Banyak pembudidaya ikan di Desa Mojorejo menjalankan usaha secara perorangan, yang membatasi kapasitas produksi mereka. Dalam skala kecil, mereka seringkali kesulitan dalam bersaing di pasar yang lebih luas, baik dalam hal harga maupun kualitas produk. Keterbatasan modal juga menjadi faktor yang menghambat pengembangan usaha budidaya ikan, di mana banyak pembudidaya ikan yang tidak memiliki akses yang cukup untuk mendapatkan dana yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka.

Kendala lain yang dihadapi adalah kurangnya kemampuan dan kapasitas dalam pengelolaan budidaya ikan modern. Hal ini dikarenakan budidaya dengan perorangan yang membuat bantuan dari pemerintah susah dilakukan serta masyarakat yang terlibat dalam budidaya ikan sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap pelatihan dan penyuluhan tentang teknik-teknik budidaya. Tanpa pengetahuan yang cukup, mereka melakukan praktik-praktik yang dapat mempengaruhi hasil panen tidak optimal, yang berpotensi mengakibatkan kerugian dan dampak negatif lainnya.

Terkait hal ini kebijakan sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan yang ada pada pembudidaya ikan, karena kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh pemerintah, dalam upaya untuk menyelesaikan

permasalahan.¹ Dalam menghadapi berbagai kendala tersebut, penting untuk membuat kebijakan mengenai pengembangan kelompok sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing budidaya ikan di Desa Mojorejo. Adapun kebijakan untuk pengembangan usaha budidaya ikan adalah dengan membentuk kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN).

Kebijakan yang membahas terkait pokdakan ada pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan menjadi landasan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam sektor perikanan. Keputusan ini membahas berbagai bentuk kelembagaan perikanan, salah satu dalam keputusan tersebut membahas pembentukan Kelompok Pembudidaya Ikan (Junita, 2024). Pokdakan menjadi solusi bagi para pembudidaya ikan berskala kecil yang tersebar di berbagai kelurahan dan desa. Sebelumnya, mereka beroperasi secara individual, seringkali menghadapi kendala akses terhadap sumber daya, teknologi, dan pasar yang lebih luas.

Dengan adanya Pokdakan, para pembudidaya ikan kecil ini dapat bergabung dan membentuk suatu kesatuan yang lebih kuat. Mereka dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Lebih dari sekadar kumpulan individu, Pokdakan berperan sebagai wadah kolaborasi, memungkinkan anggota untuk belajar satu sama lain, berbagi risiko, dan meningkatkan daya tawar mereka dalam hal pemasaran produk (Baihaqi, 2020). Hal ini secara signifikan meningkatkan peluang keberhasilan usaha budidaya ikan mereka.

Pembentukan Pokdakan juga memberikan landasan bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan kelembagaan secara terstruktur. Pemerintah dapat memberikan pelatihan, bantuan teknis, dan akses terhadap teknologi modern. Dengan demikian, pemerintah dapat menjembatani kesenjangan antara pembudidaya ikan dan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan (Triswiyana,

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 20

2022). Program-program bantuan dan pendampingan dapat lebih terarah dan efektif karena adanya wadah organisasi yang terstruktur dengan membentuk Pokdakan.

Secara keseluruhan, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2012, khususnya terkait dengan pembentukan Pokdakan, merupakan langkah strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat di sektor perikanan. Dengan adanya Pokdakan, para pembudidaya ikan kecil tidak lagi bekerja sendiri-sendiri, melainkan tergabung dalam suatu kelompok yang memiliki kekuatan yang kolektif untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan mereka. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru, dan pada akhirnya dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tingkat desa dan kelurahan. Pokdakan menjadi jembatan antara potensi sumber daya lokal dengan akses terhadap pasar dan menerapkan inovasi dalam menggunakan teknologi modern (Albert & Elfitasari, 2020). Serta dalam pembentukan pokdakan akan membangun hubungan yang positif antara masyarakat dan pemerintah dalam memajukan sektor perikanan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas tentang masalah yang dicakup oleh penelitian ini:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pokdakan dalam budidaya perikanan di Desa Mojorejo Kota Batu.
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pokdakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Mojorejo Kota Batu

C. Tujuan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini

1. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan pokdakan dalam budidaya perikanan di Desa Mojorejo Kota Batu.

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pokdakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Mojorejo Kota Batu.

D. Manfaat Penelitian

Harapannya hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat dari segi teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta pemikiran mengenai implementasi kebijakan pokdakan dalam budidaya perikanan untuk meningkatkan perekonomian di Desa Mojorejo Kota Batu. Sehingga nantinya dapat menjadi bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan informasi dan diterapkan oleh pihak-pihak dalam ruang lingkup penelitian ini, adapun pihak-pihak yang dimaksud antara lain:

- a. Manfaat bagi peneliti

Peneliti ini nantinya dapat memperdalam mengenai implementasi kebijakan pokdakan dalam budidaya perikanan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Mojorejo Kota Batu, sehingga penulis menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kuliah.

- b. Civitas Akademika

Pada penelitian ini hendaknya dapat menjadi referensi terkait implementasi kebijakan pokdakan dalam budidaya perikanan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Mojorejo Kota Batu. Hal ini dimaksudkan untuk mengasah analisis mahasiswa UMM, khususnya mahasiswa ilmu pemerintahan mengenai penelitian ini.

E. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan penjelasan singkat suatu konsep-konsep variabel yang ada dalam penelitian ini. Dari judul diatas definisi konseptual yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan konsep yang terus berkembang mencakup berbagai seluruh isu permasalahan masyarakat. menurut Tachjan dalam Herdiana (2018) bahwa 2018 kebijakan pada dasarnya merupakan hasil dari kesepakatan yang melibatkan berbagai pilihan yang saling terkait. Secara umum, kebijakan merupakan tindakan pemerintah yang mengatur kehidupan masyarakat dan publik. Pemerintah menciptakan berbagai kebijakan untuk memfasilitasi pembangunan yang optimal, memenuhi kebutuhan pokok, dan dapat menyelesaikan masalah yang terjadi pada masyarakat.

Kebijakan publik muncul karena adanya dasar yang digunakan dalam menangani permasalahan yang ada pada masyarakat. Tujuan dari kebijakan publik adalah untuk menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang telah ditetapkan oleh para pihak terkait. Menurut Anggara, kebijakan publik dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan satu sama lain.

Kebijakan publik menurut Anggara (2014), merujuk pada serangkaian keputusan yang saling terkait yang dikeluarkan oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Sebuah kebijakan terkait dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan suatu tindakan tertentu. Kebijakan publik merupakan keputusan dari pemegang otoritas publik yang mengikat masyarakat luas. Pemegang mandat yang membuat kebijakan publik harus mewakili masyarakat karena mereka memiliki kewenangan yang diberikan oleh publik.²

Menurut Abdul Wahab (2005), kebijakan publik adalah suatu perbuatan yang memiliki kekuatan hukum yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu permasalahan tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar dari warga masyarakat.

2. Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (1974) dalam Dewi (2019) mendefinisikan pada implementasi kebijakan publik sebuah tindakan yang mengubah keputusan sebelumnya menjadi tindakan operasional. Tindakan ini mencakup pada upaya

² Sahya Anggara, Kebijakan Publik, hal. 35

untuk menerjemahkan keputusan menjadi langkah-langkah konkret dalam waktu yang ditentukan. Hal ini dilakukan untuk mendorong pencapaian perubahan, baik yang besar maupun kecil, yang telah ditetapkan oleh organisasi publik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:³

- a. Standar dan sasaran kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Karakteristik organisasi
- d. Hubungan antar organisasi
- e. Disposisi pelaksana
- f. Dukungan dalam sosial, politik, dan ekonomi

3. Kelompok Pembudidaya Ikan

Kelompok pembudidaya ikan atau pokdakan merupakan kumpulan pembudidaya ikan. Pada Pemen KKP Nomor 28 tahun 2024 menjelaskan Kelompok Pembudi Daya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudi daya ikan yang dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok.

4. Budidaya

Budidaya merupakan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan hasil produksi dari suatu sumber daya tanaman, hewan, maupun sumber daya hayati lainnya (Supangat A, 2019). Secara umum, budidaya dapat diartikan sebagai suatu usaha yang terencana dan sistematis untuk melestarikan dan mengelola sumber daya alam yang ada di tanah, dengan harapan dapat memperoleh manfaat yang optimal.

Dalam konteks perikanan mencakup berbagai teknik dan praktik yang bertujuan untuk meningkatkan hasil panen, seperti pemilihan indukan unggulan,

³ Dr. Hj. Siti Marwiyah, M. SI, Kebijakan Publik,(2022), hlm. 39

serta penggunaan pakan dan air yang tepat. Selain itu, budidaya juga berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam, sehingga manfaat yang diperoleh tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian ekosistem. Dengan kata lain, budidaya bukan hanya sekedar meningkatkan kuantitas produksi, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga keberlanjutan sumber daya hayati agar dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

5. Perikanan

Perikanan merupakan aktivitas manusia yang berkaitan meliputi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati yang berada di perairan. Kegiatan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari penangkapan ikan hingga budidaya organisme akuatik seperti ikan, udang, dan kerang (Irwansyah, 2019).

Dalam konteks perikanan, pengelolaan sumber daya hayati sangat penting untuk memastikan bahwa aktivitas penangkapan dan budidaya dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini mencakup penetapan kuota penangkapan, perlindungan terhadap habitat alami, dan penerapan teknik budidaya yang ramah lingkungan. Dengan demikian, tujuan dari perikanan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem perairan agar tetap sehat dan produktif.

Secara lebih luas, perikanan juga berkontribusi terhadap perekonomian, ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya perairan (Darmawan, 2021). Oleh karena itu, pengelolaan yang sesuai prosedur dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan bagi generasi mendatang.

6. Meningkatkan Perekonomian

Perekonomian merupakan kegiatan manusia yang tidak lepas dari hubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa.⁴ merupakan ilmu yang menjelaskan tahap menghasilkan dan memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi

⁴ Sholahuddin M, Perekonomian, 2007 hlm 89

Adapun perekonomian masyarakat adalah suatu sistem perekonomian yang berasal dari kekuatan perekonomian masyarakat itu sendiri, yang dilaksanakan dengan cara mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat menjadi penghasilan, dalam sektor pertanian, Perkebunan, peternakan, dan sebagainya.

Meningkatkan perekonomian adalah upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi suatu negara atau wilayah, dengan tujuan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan produksi barang dan jasa, menciptakan lapangan kerja, menaikkan pendapatan dan daya beli masyarakat, serta menstabilkan ekonomi secara keseluruhan (Zulfa, 2021).

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi meliputi investasi dalam infrastruktur dan teknologi, peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengembangan industri dan perdagangan, serta regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor swasta (Hasan, 2018). Penting untuk memahami bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya tentang angka, tetapi juga tentang keberlanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah pertumbuhan yang sejalan dengan perlindungan lingkungan dan pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi.

Dua aspek yang dapat menunjukkan peningkatan perekonomian adalah perkembangan usaha dan situasi ekonomi di dalam keluarga. Perkembangan usaha merujuk pada peningkatan jumlah dari suatu usaha. Ketika usaha berkembang, maka pendapatan keluarga juga akan meningkat, yang tercermin dari peningkatan pendapatan keluarga. Menurut Benedicta Dwi Riyanti, keberhasilan usaha dapat dinilai dari beberapa aspek penting seperti peningkatan modal, produksi, jumlah pelanggan, perluasan usaha, dan peningkatan fasilitas fisik.⁵

F. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu sebuah konsep yang masih bersifat abstrak dan digunakan untuk memudahkan pengukuran variabel atau dijadikan dalam melakukan kegiatan atau digunakan sebagai penelitian ilmiah. Definisi operasional ini juga digunakan peneliti untuk menyampaikan penjelasan terkait

⁵ Benedicta Dwi Riyanti, *Kewirausahaan Dari Sudut Pandang Psikologi Kepribadian*, (Jakarta: Grasindo, 2003), hlm 28

bagaimana menilai masing-masing variabel penelitian dengan menentukan beberapa indikator.

1. Implementasi kebijakan pokdakan dalam Budidaya perikanan di Desa Mojorejo Kota Batu.
 - a. Prosedur pendirian
 - b. Pendampingan kelompok
 - c. Optimalisasi kelembagaan pokdakan
 - d. Kerja sama pokdakan
 - e. Integritas penyuluh
 - f. Kontribusi masyarakat
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pokdakan dalam budidaya perikanan untuk meningkatkan perekonomian di Desa Mojorejo Kota Batu

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah sehingga dapat dilakukan dengan terencana, sistematis, terstruktur, dan memiliki tujuan baik secara teoritis maupun praktis. Menurut Sekaran penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terorganisir, sistematis, berbasis data yang didapatkan, kemudian dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah (Raco, 2010). sehingga mendapatkan jawaban yang lebih mendalam atas suatu masalah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif berkaitan dengan pengumpulan dan analisis data naratif daripada dalam bentuk numerik. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berupa penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan deskripsi faktual yang sistematis dan akurat tentang situasi kejadian. Selain itu, deskriptif kualitatif juga menggambarkan dan menjelaskan berbagai kondisi yang ada di masyarakat dan menjadi subjek penelitian, berbagai fenomena realitas sosial yang berbeda (Wahyuni, 2022). Sehingga peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif berdasarkan tujuan untuk menggambarkan mengenai realita yang terjadi pada masyarakat tentang Implementasi kebijakan pokdakan dalam

budidaya perikanan untuk meningkatkan perekonomian di Desa Mojorejo Kota Batu.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber yang dapat memberikan informasi yang diperlukan seorang peneliti. Pada penelitian ini, subjek penelitian yang menjadi sasaran yaitu:

- a. Ketua kelompok budidaya ikan, karena menjadi unsur pengarah dalam kelompok sehingga menjadi subjek penelitian pada implementasi kebijakan pokdakan dalam budidaya perikanan untuk meningkatkan perekonomian di Desa Mojorejo Kota Batu
- b. Penyuluh perikanan ahli pratama, karena penyuluh perikanan merupakan fasilitator yang dibawah oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga dapat memberikan informasi mengenai kebijakan kelompok Pembudidaya Ikan.
- c. Kepala Desa Mojorejo, karena Pemerintah Desa juga sangat penting dalam memberikan informasi terkait kebijakan pokdakan dalam budidaya perikanan untuk meningkatkan perekonomian di Desa Mojorejo Kota Batu
- d. Kasi pelayanan Umum, karena kelompok budidaya ikan masuk dalam program kerja bidang pemberdayaan di bawah kasi pelayanan umum sehingga menjadi subjek penelitian dalam kebijakan pokdakan dalam budidaya perikanan untuk meningkatkan perekonomian di Desa Mojorejo Kota Batu

3. Sumber Data

Sumber data untuk menyempurnakan dan memperkuat penelitian ini didapat melalui berbagai sumber yang terbagi menjadi 2 yaitu:

- a. Sumber data primer

Sumber data primer dapat diperoleh dari hasil wawancara yang mendalam, observasi serta melakukan dokumentasi. Sumber primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara kepada ketua kelompok

budidaya ikan, Penyuluh Perikanan, Kepala Desa Mojorejo dan Kasi Pelayanan Umum Desa Mojorejo.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui Lembaga tertentu mengenai penelitian. Data ini juga diperoleh melalui literatur, artikel dan jurnal terhadap suatu kajian teori yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dilakukan dalam menjawab rumusan masalah guna mendapatkan data yang akan diperoleh secara objektif. Patton (2002) dalam (Firdiansyah, 2022) menyatakan ada tiga jenis dalam pengumpulan data, diantaranya ialah observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi melibatkan pengamatan langsung di lapangan untuk mengamati fakta-fakta yang terjadi di tempat penelitian. Hasil observasi ini dicatat oleh peneliti untuk mencatat fenomena yang saling berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti. Observasi yang dilakukan meliputi lokasi pokdakan yang ada di Desa Mojorejo, bantuan sarana dan prasarana dari Pemerintah Desa Mojorejo, dan pendampingan yang dilakukan penyuluh perikanan.

b. Wawancara

Wawancara digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data langsung dari responden dengan menanyakan pertanyaan yang relevan dengan topik penelitian. Ada dua jenis wawancara, yaitu terstruktur dan tak terstruktur, yang membantu peneliti mendapatkan informasi tambahan yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau dokumentasi. Adapun yang di wawancara meliputi subjek penelitian yang terdiri dari, Ketua Kelompok, Penyuluh Perikanan, Kepala Desa Mojorejo Dan Kasi Pelayanan Umum.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015:329) dalam Setyaningrum (2023) dokumentasi adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mencatat peristiwa yang telah terjadi. Dokumentasi ini berperan dalam mengumpulkan data dan informasi melalui

berbagai bentuk seperti buku, gambar, laporan, dan keterangan yang mendukung proses penelitian. Dokumentasi yang dilakukan peneliti meliputi dokumentasi hasil wawancara dengan subjek penelitian, dokumentasi surat keputusan pembentukan pokdakan di Desa Mojorejo, dokumentasi bantuan sarana dan prasarana dari Pemerintah Desa Mojorejo.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses yang dilakukan untuk mencari dan Menyusun data secara sistematis data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya. sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Miles dan Huberman dalam menentukan aktivitas analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang akan dijelaskan sebagai berikut (Sugiyono, 2018, p. 322).

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu metode meringkas, memilih dan mengklasifikasikan yang paling penting dan lebih penting, serta mengklasifikasikan pola-pola secara tepat sedemikian rupa sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data. Serta memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan dalam menarik kesimpulan.

b. Penyajian Data

Penelitian kualitatif dapat dilakukan pada penyajian data dalam bentuk teks naratif, grafik, dan matriks. Penyajian data berlangsung dalam bentuk narasi yang jelas setelah menganggap data yang diterima valid dan disajikan apa adanya. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, flowchart, bagan atau hubungan antar kategori.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan atau memvalidasi inferensi. Seiring berjalannya proses pengumpulan data penelitian, kesimpulan ditarik secara berkala. Karena kesimpulan awal berubah dalam jangka waktu tertentu ketika data tercium, kesimpulan awal dapat dikatakan reliabel kecuali ada bukti yang mendukung data tersebut. Selain itu, karena masalah penelitian, kesimpulan ini mungkin tidak menjawab pertanyaan pertama

dalam penelitian kualitatif yang masih bersifat sementara dan keadaan lapangan yang tidak sesuai sehingga akan memicu mengembangkan hasil penelitian.

